



LAKIP 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Arah Lagundri Km.7 Teluk Dalam

Email : perindagnias Selatan@gmail.com

Kode Pos:22865



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 ini dapat terselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja setiap bidang yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan.

Secara garis besar Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode Renstra 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tercemin dalam setiap indikator kerjanya serta memuat aspek keuangan yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada besar harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Terima kasih.

Teluk Dalam, 03 Maret 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan



F. Martin Ley, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP 19750316 199801 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan berkewajiban untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tentang perindustrian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Nias Selatan pada periode tahun anggaran 2024. Laporan ini juga sekaligus bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2024.

Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024, Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan yang telah di gariskan sebagai pelaksanaan program atau kegiatan dan sebagai pencapaian target berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan tugasnya, mempunyai 21 Personil yang terdiri dari Sastra 2 (S2) sebanyak 7 orang, Sastra 1 Sebanyak 9 orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 1 orang dan SMA sederajat sebanyak 4 orang. Dari sisi akuntabilitas keuangan, Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp982.600.000.- dengan realisasi sebesar Rp945.657.538.- atau sebesar 96,24%

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan disusun berdasarkan Peraturan



Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka memberikan arahan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Lakip sebagai bahan integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Selanjutnya diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dimasa yang akan datang.

Telukdalam, 03 Maret 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan



E. Martin Ley, SE., MM
Pemula Utama Muda

NIP. 19750316 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	10
1.6 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana strategis	14
2.2 Visi dan Misi	15
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	16
2.4 Indikator Kinerja Utama	17
2.5 Strategi Kebijakan	18
2.6 Rencana Kerja	19
2.7 Perjanjian Kinerja.....	28
2.8 Rencana Kinerja Tahunan	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	35
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	36
3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022.....	41



3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	48
3.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	42
3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
3.6	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	46
B.	REALISASI ANGGARAN.....	50
BAB IV	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan.....	53
LAMPIRAN.....		54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Organisasi	10
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Eselon	10
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	11
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.1	Matriks Rencana Strategis	15
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan	18
Tabel 2.5	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.....	20
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	29
Tabel 2.7	Rencana Aksi 2023	33
Tabel 3.1	Analisis Pencapaian Kinerja	36
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	37
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2022.....	39
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022	41
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Renstra 2022-2026	42
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	43
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 3.8	Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Pertama	47
Tabel 3.9	Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Kedua.....	49
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	51
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2023 dengan Tahun 2022	51
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2023	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8
Gambar 2.1	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	15
Gambar 2.2	Pohon Kinerja Tahun 2023	30
Gambar 3.1	Dokumentasi Perencanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	47
Gambar 3.2	Dokumentasi Monitoring dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.....	48



DAFTAR GRAFIK

Diagram 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Organisasi	10
Diagram 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Eselon	10
Diagram 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	11
Diagram 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	11



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam organisasi pemerintahan, Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 menjadi laporan keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01_5_57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan merupakan organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang



dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Nias Selatan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

1.2 TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dimaksudkan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Tahun Anggaran 2024. Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan di masa yang akan datang.



1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 Kedudukan dan Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 01_5_57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan. Kedudukan Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas Pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

1.3.2 Fungsi

Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perindustrian dan Perdagangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Menteri teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Industri
 - a. Seksi Standarisasi, Desain Produk dan Promosi



- b. Seksi Industri Mesin, Tekstil, Aneka Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
- c. Seksi Industri Agro dan Kimia
- d. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Pembinaan Perdagangan Informal
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
 - c. Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya masing-masing jabatan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama OPD teknis.

2. **Sekretaris**, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub. Bagian, terdiri atas:

- a) **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**



Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan barang, pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan

b) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, laporan dinas rencana kebutuhan anggaran, administrasi keuangan, laporan pengelolaan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan.

3. Bidang Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas, bidang perindustrian melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perindustrian;
- b. Pelaksanaan kegiatan perindustrian;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan perindustrian;
- d. Menetapkan rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
- e. Penerbitan izin usaha kecil dan izin usaha industri menengah;
- f. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
- g. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten/kota
- h. Menyiapkan laporan informasi industri untuk IUI kecil dan IUI menengah dan izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang perindustrian dibantu 3 (tiga) seksi, terdiri atas :

a) Seksi Standarisasi, Desain Produk Dan Promosi mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi dan desain produk;
- 2) Menyiapkan fasilitas pengembangan teknis standarisasi dan desain produk terkait pelaksanaan fasilitas pengembangan usaha industri pameran, promosi, misi dagang industri) dan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM);



- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis standarisasi dan desain produk;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Alat Transportasi, Elektronika Dan Telematika mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka alat transportasi, elektronika dan telematika;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka alat transportasi, elektronika dan telematika, yaitu bahan pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM);
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka alat transportasi, elektronika dan telematika;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Agro Dan Kimia mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri agro dan kimia;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis agro dan kimia, yaitu bahan pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM);
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri agro dan kimia;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas.

4. Bidang Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas di bidang perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas, bidang perdagangan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perdagangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- d. Melakukan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- e. Melaksanakan fasilitas sarana distribusi perdagangan;
- f. Melaksanakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan ekspor;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan standarisasi dan perlindungan konsumen,



- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidangnya•

Bidang perdagangan dibantu 3 (tiga) seksi, terdiri atas:

a) Seksi Pembinaan Pedagang Informal, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pedagang informal;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal berupa pendataan usaha pedagang informal, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk penataan dan pembinaan pedagang informal;
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal;
- 4) Mengkoordinasikan penerbitan tanda daftar gudang, surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- 5) Mengkoordinasikan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 3) Menyiapkan bahan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya tingkat daerah kabupaten/kota;
- 4) Menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
- 5) Melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.



c) **Seksi Pembinaan, Distribusi, Dan Pemasaran** mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
- 3) Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- 4) Menyiapkan bahan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kabupaten/nias selatan;
- 5) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- 6) Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota;
- 7) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota;
- 8) Melakukan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten Nias Selatan;
- 9) Melaksanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- 11) Melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) **Unit Pelaksana Teknis**

Dinas dapat membentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) **Kelompok Jabatan Fungsional**

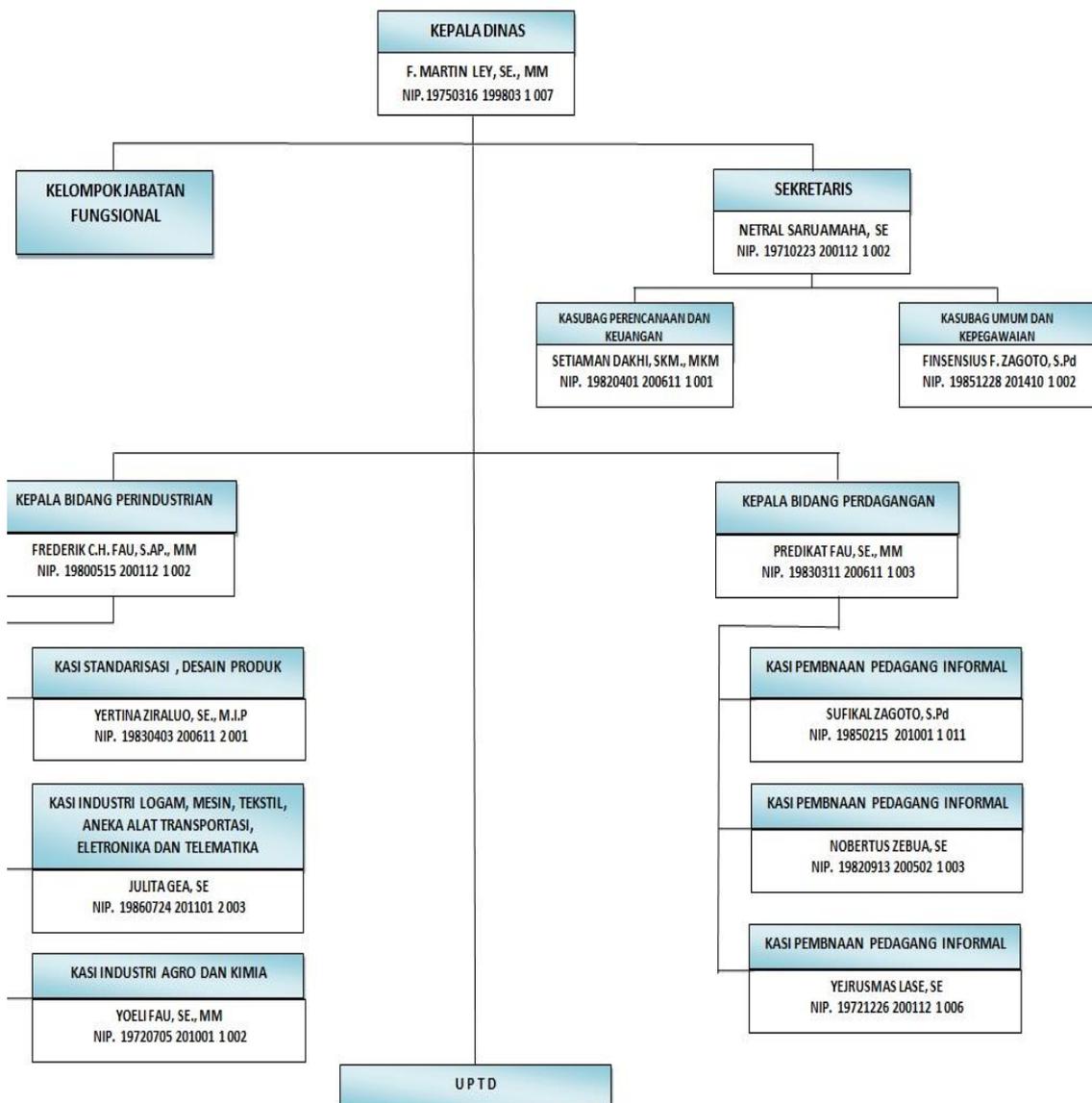
- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.



- 2) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah danberanggung jawab kepada kepala dinas.
- 3) Tenaga fungsional senior diangkat dan ditetapkan oleh kepaladinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk lebih jelas serta memberi gambaran mengenai struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan maka dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut dibawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan



Keadaan Januari s/d Desember 2024

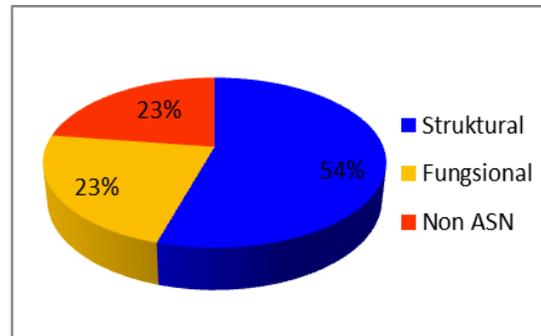
1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, kompetensi dan kemampuan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang perlu terus ditingkatkan. Pada Tahun 2024 jumlah pegawai Dinas perindustrian dan Perdagangan sebanyak 21 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 16 orang dan Non PNS sebanyak 5 orang. Jumlah pegawai berdasarkan uraian tugasnya selengkapnya dapat di lihat pada tabel dan diagram dibawah ini

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Organisasi

No	Uraian	2023	Peresentase
1	Struktural	12	54%
2	Fungsional	4	23%
3	Non ASN	5	23%
Jumlah		21	100%

Diagram 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Organisasi



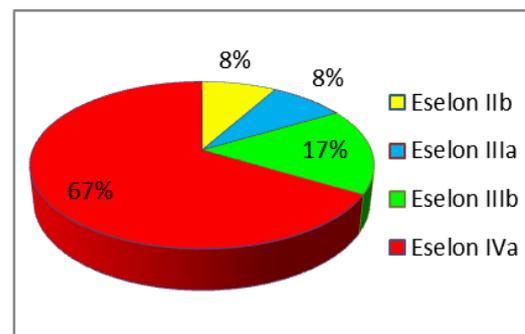
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, per 31 Desember 2024

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Uraian	2023	Peresentase
1	Eselon IIb	1	8%
2	Eselon IIIa	1	8%
3	Eselon IIIb	2	17%
4	Eselon IVa	7	67%
Jumlah		11	100%

Diagram 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Eselon



Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, per 31 Desember 2024

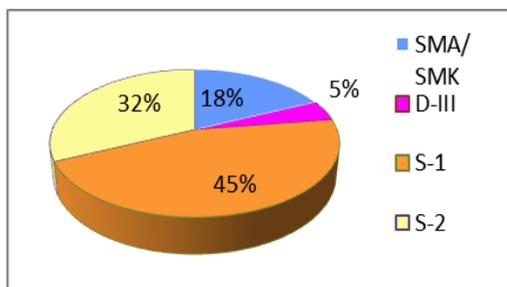


Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	2023	Peresentase
1	SMA/SMK	4	18%
2	D-III	1	5%
3	S-1	19	45%
4	S-2	7	32%
Jumlah		21	100%

Diagram 1.3
Data Pegawai Berdasarakan Jenjang Pendidikan



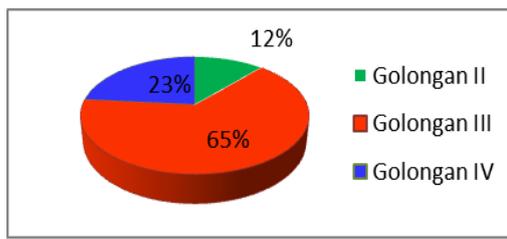
Sumber:Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, per 31 Desember 2024

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	2023	Peresentase
1	Golongan II	2	12%
2	Golongan III	10	65%
3	Golongan IV	4	23%
Jumlah		16	100%

Diagram 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber:Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, per 31 Desember 2024

1.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan serta hasil telaahan Kementerian Lembaga, dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan antara lain:

1. Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan menjadi isu utama dalam rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, rendahnya nilai produksi, kualitas produk belum baik, minimnya pertumbuhan industri baru menjadi akibat dari isu tersebut selain itu belum terwujudnya daya saing produk industri Kab. Nias Selatan dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar baik itu nasional maupun



Internasional. Bahkan untuk produk dalam negeri pun, produk kita masih belum memiliki daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan tangan, dan lainnya. Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

2. Rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan, besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor ini menjadi salah satu indikator meningkatnya sektor perdagangan di daerah. beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kontribusi sektor perdagangan diantaranya rendahnya pembinaan pedagang, rendahnya keamanan produk dan keamanan perdagangan serta belum maksimalnya pelaksanaan pemasaran produk, masalah tersebut perlu diatasi melalui sasaran sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain beberapa hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang mempengaruhi faktor-faktor pelayanan berdasarkan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri;
2. Belum terpetakannya kawasan untuk pengembangan industri;
3. Masih belum tersedianya akses untuk pengembangan industri.
4. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam dan Luar Daerah, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian



fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok.

5. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
6. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Melalui perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

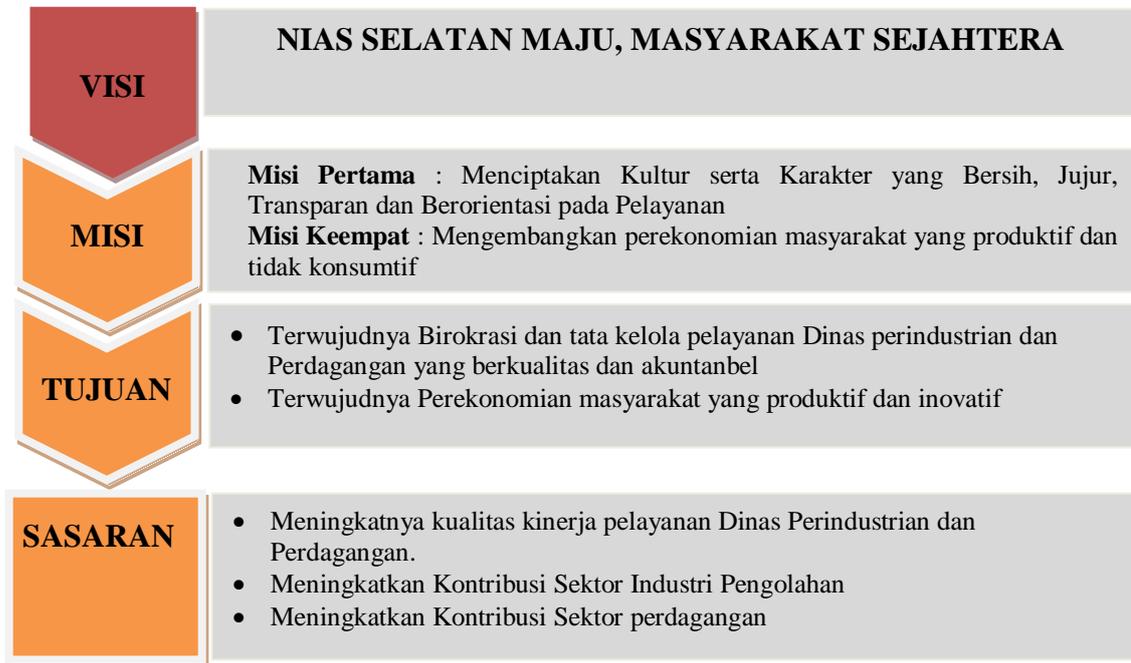
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan pada tahun sebelumnya dan tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 2024.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengemban dan mendukung Misi Pertama dan Misi Keempat yaitu, Misi Pertama “Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan” dan Misi Keempat “Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif”. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran



Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan di susun dan dirumuskan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Ddalamnya termasuk Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun, serta arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.1

Matriks Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terlampir

2.2 VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”. Visi tersebut kemudian dimanifestasikan kedalam 5 Misi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengemban dan mendukung daalm pelaksanaan Misi Pertama dan Misi Keempat yaitu:

Misi Pertama: Menciptakan Kultur Pemerintah Yang Bersih, Mandiri, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang



berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

Misi Keempat: Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif Dan Tidak Konsumtif, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1 TUJUAN

Berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan yang berhubungan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Menciptakan Kultur Pemerintah Yang Bersih, Mandiri, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan,

Tujuan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah “Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pelayanan Dinas perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas dan akuntabel”

Misi Keempat: Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif Dan Tidak Konsumtif

Tujuan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah “Terwujudnya Perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif”.

2.3.2 SASARAN

Sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanandan bersinergi. Untuk mewujudkannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan menetapkan Sasaran, dan indikator kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini



Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan	Nilai SAKIP DISPERINDAG (Evaluasi Internal)	Predikat	B
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	0,19%
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	9,40%

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026

2.4 Indikator Kinerja Utama

Dalam mendukung keberhasilan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan perdagangan merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum. Indikator Kinerja Utama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi	Sumber Data	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
						2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan	Nilai SAKIP DISPERINDAG (Evaluasi Internal)	Predikat	Sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan	Penilaian oleh APIP/Inspektorat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nias Selatan	CC	B	B	B	B
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	untuk mengetahui perkembangan daya saing terhadap harga berlaku	jumlah PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) dibagi jumlah total PDRB di kali 100%	BPS	0.17%	0.18%	0.19%	0.20%	0.21%
Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	untuk mengetahui perkembangan daya saing terhadap harga berlaku	jumlah PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dibagi jumlah total PDRB di kali 100%	BPS	9.00%	9.10%	9.20%	9.30%	9.40%

2.5 STRATEGI KEBIJAKAN

Untuk mncapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komperhensif yang nantinya diwujudkan dalam serangkaian arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera						
Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi						
Misi I : pada Pelayanan						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pelayanan Dinas perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas dan akuntabel	1.1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	1.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perindustrian dan perdagangan	1.1.1.1	Pendidikan dan pelatihan pada ASN baik formal maupun non formal
					1.1.1.2	Penataan sistem dan manajemen Penempatan SDM aparatur yang sesuai
Misi IV : Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif						
Terwujudnya Perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif	1.1	Terwujudnya Stabilitas harga barang di daerah	1.1.1	Mengembangkan potensi Sumber daya alam menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	1.1.1.1	Meningkatkan pengelolaan IKM melalui pembinaan dan pelatihan



				1.1.1.2	Meningkatkan pengetahuan pengelolaan sumber daya alam
				1.1.1.3	Pembangunan/re vitalisasi sarana perdagangan
				1.1.1.4	Promosi
				1.1.1.5	sosialisasi dan perlindungan konsumen serta pembinaan kepada pedagang

2.6 RENCANA KERJA

Berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, telah tertuang didalam dokumen Rencana Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 81 Tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2024 dilakukan perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja PD tahun 2024 adalah:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. Adanya pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Tabel Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tael berikut ini:



Tabel 2.5
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2024			Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2024			Bertambah/(Berkurang)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Kegiatan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		A/B/C		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3																	
URUSAN PILIHAN																	
3	30																
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN																	
3	30	01															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Nisel	100 %	675,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Nisel	100 %	417,426,150	(257,573,850)	100 %	1,517,703,515		
3	30	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Nisel	8 Dok	45,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Nisel	8 Dok	23,004,060	(21,995,940)	8 Dok	45,000,000	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nisel	1 Dok	7,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nisel	1 Dok	3,554,850	(3,945,150)	1 Dok	7,500,000
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nisel	1 Dok	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nisel	1 Dok	3,901,770	(3,598,230)	1 Dok	7,500,000
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nisel	1 Dok	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nisel	1 Dok	3,876,360	(3,623,640)	1 Dok	7,500,000
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nisel	1 Dok	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nisel	1 Dok	4,079,220	(3,420,780)	1 Dok	7,500,000
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nisel	1 Dok	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nisel	1 Dok	4,037,010	(3,462,990)	1 Dok	7,500,000
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	3 Dok	7,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	3 Dok	3,554,850	(3,945,150)	3 Dok	7,500,000



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	30	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Nisel	5 Lap	66,500,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Nisel	5 Lap	56,104,415	(10,395,585)	5 Lap	785,526,515	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nisel	18 Org/Bln	54,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nisel	18 Org/Bln	47,160,065	(6,839,935)	14 Org/Bln	770,526,515
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nisel	1 Lap	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nisel	1 Lap	4,472,175	(527,825)	1 Lap	7,500,000
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nisel	4 Lap	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nisel	4 Lap	4,472,175	(3,027,825)	4 Lap	7,500,000
3	30	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	Nisel	#REF! Lap	7,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	Nisel	- Lap	-	(7,500,000)	3 Lap	10,000,000	
3	30	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nisel	1 Lap	7,500,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nisel	- Lap	-	(7,500,000)	1 Lap	10,000,000
3	30	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	Nisel	28 org	45,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	Nisel	- org	-	(45,000,000)	25 Paket	55,000,000	
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nisel	28 Paket	30,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nisel	- Paket	-	(30,000,000)	25 Paket	27,500,000
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nisel	3 org	15,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nisel	5 org	-	(15,000,000)	5 org	27,500,000
3	30	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Nisel	100 %	359,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Nisel	100 %	195,066,825	(163,933,175)	100 %	365,000,000	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nisel	10 Paket	2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nisel	- Paket	-	(2,500,000)	10 Paket	5,000,000
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nisel	10 Paket	7,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nisel	- Paket	-	(7,500,000)	10 Paket	15,000,000
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nisel	10 Paket	64,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nisel	- Paket	-	(64,000,000)	10 Paket	50,000,000
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nisel	12 Paket	40,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nisel	12 Paket	80,814,800	40,814,800	12 Paket	50,000,000
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nisel	12 Paket	35,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nisel	12 Paket	12,180,025	(22,819,975)	12 Paket	30,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan	Nisel	12 Dok	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan	Nisel	- Dok	-	(10,000,000)	12 Dok	15,000,000	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nisel	12 Lap	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nisel	12 Lap	102,072,000	(97,928,000)	12 Lap	200,000,000	
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Nisel	6 Unit	20,000,000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Nisel	6 Unit	13,680,850	(6,319,150)	6 Unit	25,000,000	
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nisel	5 Unit	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nisel	5 Unit	13,680,850	(6,319,150)	5 Unit	25,000,000	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Nisel	100 %	88,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Nisel	100 %	88,000,000	-	100 %	189,000,000	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nisel	1500 Lap	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nisel	1500 Lap	10,000,000	-	1500 Lap	15,000,000	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nisel	9 Lap	78,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nisel	9 Lap	78,000,000	-	9 Lap	174,000,000	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Nisel	17 Unit	44,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Nisel	17 Unit	41,570,000	(2,430,000)	17 Unit	43,177,000	
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nisel	1 Unit	44,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nisel	1 Unit	41,570,000	(2,430,000)	1 Unit	43,177,000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	Nisel	30 %	40,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	Nisel	- %	-	(40,000,000)	45 %	75,000,000	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Nisel	30 Dok	20,000,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Nisel	- Dok	-	(20,000,000)	35 Dok	25,000,000	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nisel	30 Dok	20,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nisel	- Dok	-	(20,000,000)	35 Dok	25,000,000	



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Adanya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya	Nisel	20 Lap	20,000,000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Adanya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya	Nisel	- Lap	-	(20,000,000)	35 Lap	50,000,000
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Nisel	20 Lap	10,000,000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Nisel	- Lap	-	(10,000,000)	35 Lap	25,000,000
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Nisel	20 Dok	10,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Nisel	- Dok	-	(10,000,000)	35 Dok	25,000,000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Nisel	75 %	135,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Nisel	75 %	135,117,350	117,350	80 %	125,000,000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya barang Kebutuhan barang Pokok bagi Masyarakat	Nisel	75 Lap	30,000,000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya barang Kebutuhan barang Pokok bagi Masyarakat	Nisel	- Lap	-	(30,000,000)	90 Lap	75,000,000
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	25 Lap	10,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	- Lap	-	(10,000,000)	30 Lap	25,000,000
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	25 Lap	10,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	- Lap	-	(10,000,000)	30 Lap	25,000,000
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	25 Lap	10,000,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	- Lap	-	(10,000,000)	30 Lap	25,000,000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Nisel	41 Lap	90,000,000	Pengendalian Harga, dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Nisel	41 Lap	118,244,650	28,244,650	#REF! Lap	75,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	10 Lap	20,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	10 Lap	18,244,650	(1,755,350)	10 Lap	40,000,000
70	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	1 Lap	70,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	1 Lap	100,000,000	30,000,000	1 Lap	35,000,000
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	Nisel	70 Lap	15,000,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	Nisel	70 Lap	16,872,700	1,872,700	Lap	50,000,000
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Nisel	25 Lap	15,000,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Nisel	25 Lap	16,872,700	1,872,700	25 Lap	50,000,000
3	31				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN												
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang Terselesaikan	Nisel	100 %	75,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang Terselesaikan	Nisel	100 %	30,056,500	(44,943,500)	100 %	50,000,000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Nisel	4 Dok	75,000,000	Penyusunan dan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Nisel	4 Dok	30,056,500	(44,943,500)	4 Dok	50,000,000
3	31	02	2.01	04	koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Nisel	1 Dok	25,000,000	koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Nisel	- Dok	-	(25,000,000)	1 Dok	25,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nisel	1 Dok	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nisel	1 Dok	30,056,500	(19,943,500)	1 Dok	25,000,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	Nisel	100 %	75,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	Nisel	- %	-	(75,000,000)	100 %	75,000,000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Nisel	3 Dok	75,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Nisel	- Dok	-	(75,000,000)	3 Dok	75,000,000
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINaS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINaS)	Nisel	1 Dok	25,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINaS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINaS)	Nisel	- Dok	-	(25,000,000)	1 Dok	25,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Nisel	1 Dok	25,000,000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Nisel	- Dok	-	(25,000,000)	1 Dok	25,000,000
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Nisel	1 Dok	25,000,000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Nisel	- Dok	-	(25,000,000)	1 Dok	25,000,000
					Jumlah				1,000,000,000					582,600,000	(417,400,000)		1,842,703,515

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024



2.7 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai:

- a. wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah;
- e. dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), keterkaitan (*relevant*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau pelaksanaannya. Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	Predikat	B
2	Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	0,19%
3	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	9,2 %

Anggaran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	417.426.345
2	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	535.117.155
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30.056.500
Jumlah		982.600.000

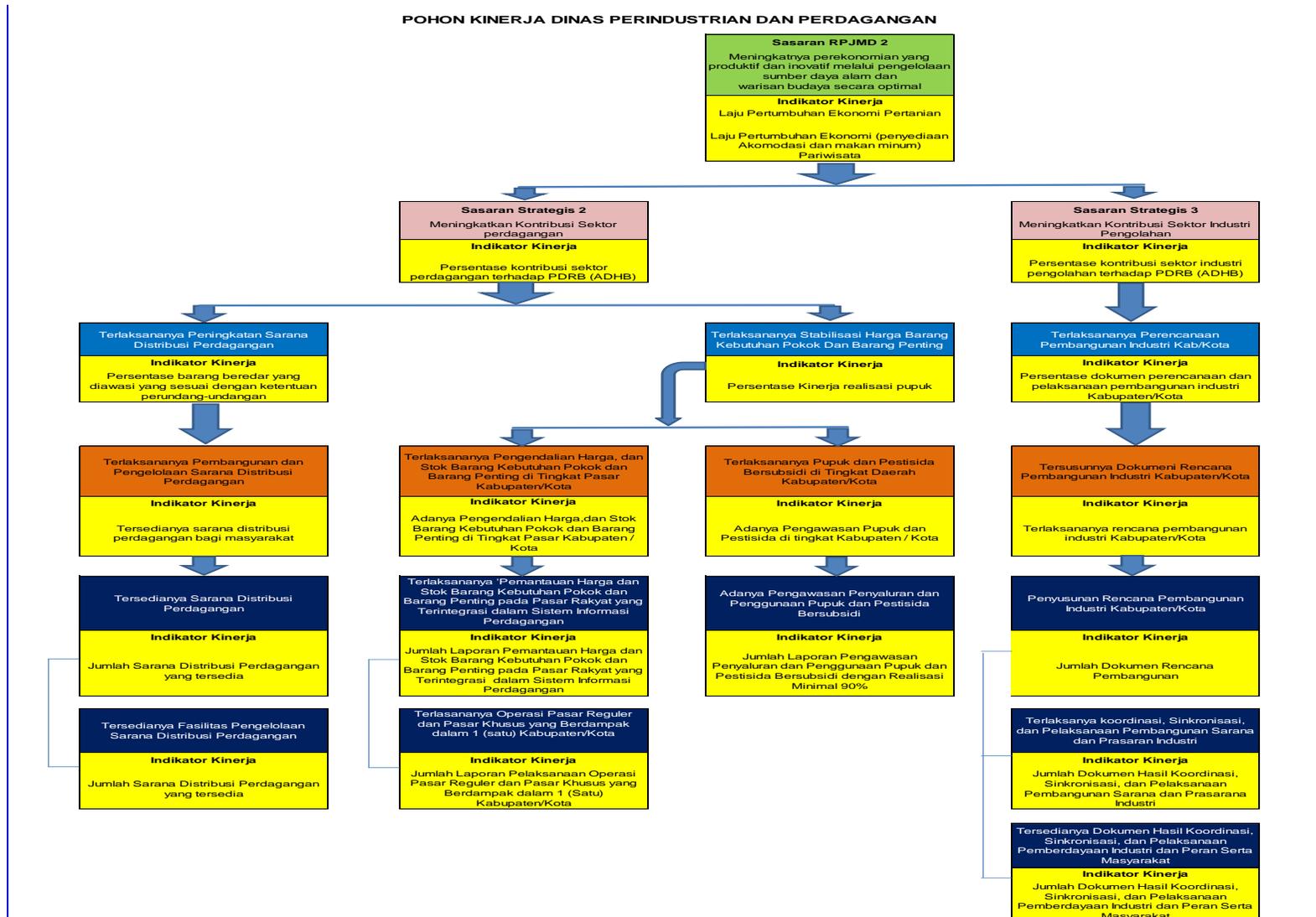
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

2.8 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan yang akan dicapai oleh satu kerja perangkat daerah pada Tahun berjalan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dan tabel Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dibawah ini:

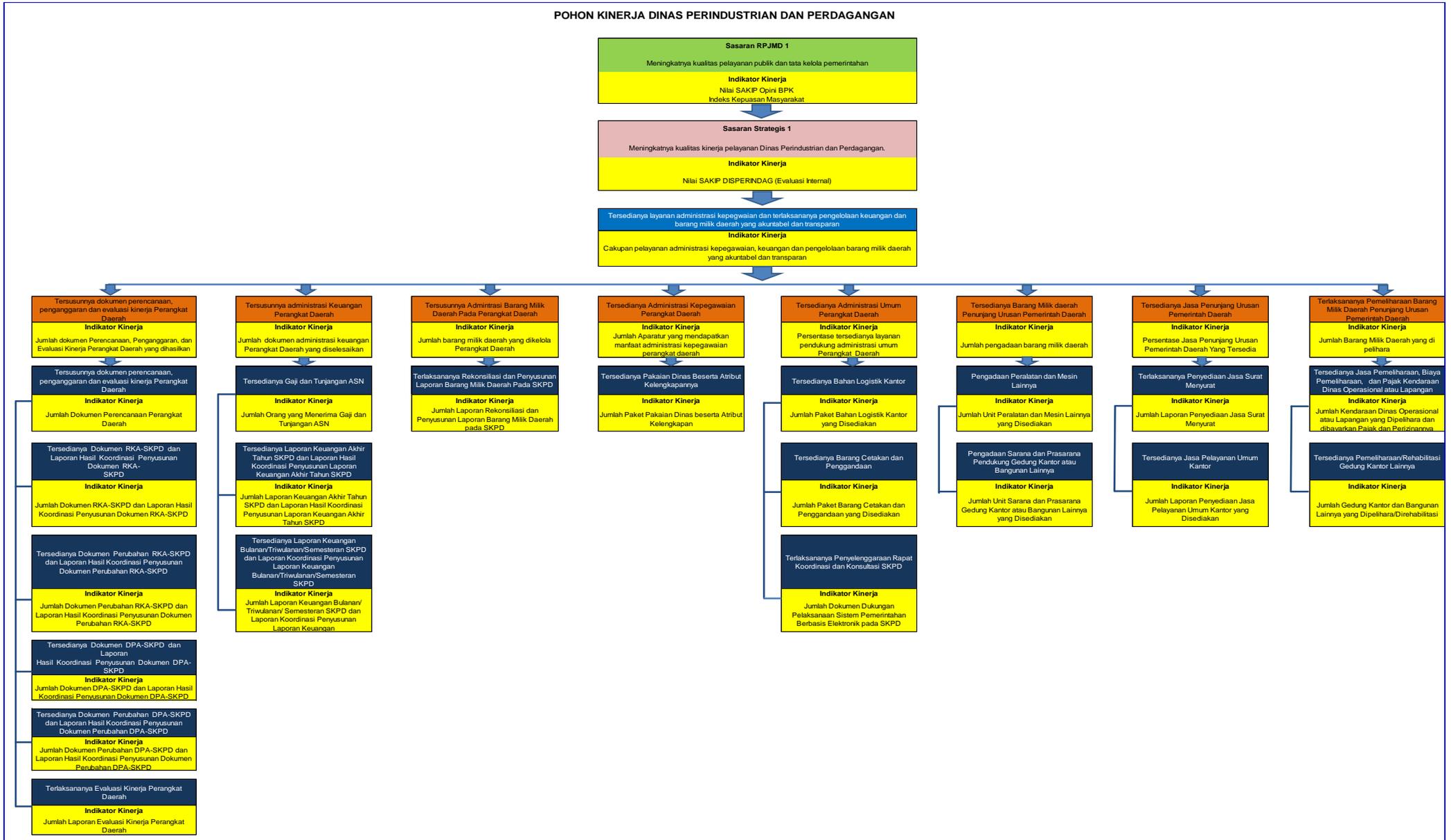


Gambar 2.2
Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024





POHON KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN





Rencana Aksi merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD.

Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.7
Rencana Aksi Tahun 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan yang di susun tepat dan waktu	Target akhir dan satuan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Target akhir dan satuan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Target akhir dan satuan	
			TW I	25%			TW I	25%			TW I	3 dok
											TW II	2 dok
											TW III	1 dok
									TW IV	2 dok		
							Target akhir dan satuan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	Target akhir dan satuan	
			TW III	25%			TW III	25%			TW I	1 dok
											TW II	1 dok
											TW III	1 dok
									TW IV	2 dok		
							Target akhir dan satuan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Target akhir dan satuan	
			TW IV	25%			TW IV	25%			TW I	25%
											TW II	25%
											TW III	25%
									TW IV	25%		
							Target akhir dan satuan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Target akhir dan satuan	
TW IV	25%	TW IV	25%	TW I	N/A							
				TW II	1 Unit							
				TW III	N/A							
				TW IV	2 unit							
		Target akhir dan satuan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Target akhir dan satuan						
TW IV	25%	TW IV	25%			TW I	25%					
						TW II	25%					
						TW III	25%					
				TW IV	25%							
		Target akhir dan satuan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Target akhir dan satuan						
TW IV	25%	TW IV	25%			TW I	4 unit					
						TW II	3 unit					
						TW III	5 unit					
				TW IV	5 unit							



2	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Target akhir dan		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Target akhir dan satuan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Target akhir dan satuan		
			TW I	N/A			TW I	20%			TW I	10 lap	
			TW III	N/A			TW II	25%			TW II	10 lap	
			TW III	N/A			TW III	15%			TW III	11 lap	
			TW IV	9.20%			TW IV	15%			TW IV	10 lap	
										Target akhir dan satuan			
										Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota		Target akhir dan satuan	
										TW I		5 lap	
										TW II		5 lap	
										TW III		10 lap	
										TW IV		5 lap	
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Target akhir dan		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang	Target akhir dan satuan		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Target akhir dan satuan		
			TW I	N/A			TW I	25%			TW I	1 dok	
			TW III	N/A			TW II	25%			TW II	1 dok	
			TW III	N/A			TW III	25%			TW III	1 dok	
			TW IV	0.19%			TW IV	25%			TW IV	1 dok	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Dalam pengukuran perlu dilakukan analisis capaian kinerja organisasi agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: data internal berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara regular.

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja Dinas



Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 mencakup pengukuran kinerja sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026.

Untuk menetapkan hasil analisis pencapaian kinerja dalam satu Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya maka telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal yang dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan Puluh Lima Persen Sampai Dengan Seratus Persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d <85%	Tujuh Puluh Persen Sampai Dengan Kurang Delapan Puluh Lima Persen	Berhasil
3	55% s.d <70%	Lima Puluh Lima Persen Sampai Dengan Kurang Tujuh Puluh Persen	Cukup Berhasil
4	<55%	Kurang Lima Puluh Lima Persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Target dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi	Sumber Data	Tahun 2024		
						Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan	Nilai SAKIP DISPERINDAG (Evaluasi Internal)	Predikat	Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan	Penilaian oleh APIP/Inspektorat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nias Selatan	B		
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	untuk mengetahui perkembangan daya saing terhadap harga berlaku	jumlah PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) dibagi jumlah total PDRB di kali 100%	BPS	0.19%	0.18%	95%
Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	untuk mengetahui perkembangan daya saing terhadap harga berlaku	jumlah PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dibagi jumlah total PDRB di kali 100%	BPS	9.20%	9.07%	99%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat di jelaskan capaian dari masing – masing indikator kinerja utama dan target capaian sebagai berikut :

- Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan (evaluasi internal) dengan target yang telah ditetapkan pada indikator ini adalah dengan Nilai “B”. Untuk realisasi kinerja tahun 2024 belum bisa disajikan berhubung karena nilai SAKIP tahun 2024 baru keluar nilai hasil rewiuwnya dari inspektorat di perkirakan pada bulan April 2024, akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan optimis bahwa nilai atau target yang telah di tetapkan yaitu Nilai “B” pasti akan tercapai dengan berpedoman pada nilai akhir Lakip tahun 2023 dengan nilai A. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyusunan LAKIP telah memadai, sesuai dengan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Indikator kinerja utama yang kedua yaitu, Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) dengan target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 0,19% Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 0,18%. Capaian Kinerja indikator Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) pada tahun tahun 2024 yaitu 95%.

Berdasarkan capaian tersebut datapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah berupaya dalam mencapai dan melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.



c. Indikator yang ketiga yaitu Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dengan target sebesar 9,20%. Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 9,10%. Capaian kinerja dari indikator Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dari target yang telah di tentukan yaitu sebesar 99%.

Berdasarkan capaian tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah berupaya dalam mencapai dan melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis organisasi yang termuat dalam Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	Penilaian oleh APIP/Inspektorat	B			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nias Selatan
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	jumlah PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) dibagi jumlah total PDRB di kali 100%	0.19%	0.18%	95%	BPS
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	jumlah PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dibagi jumlah total PDRB di kali 100%	9.20%	9.07%	99%	BPS

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat di jelaskan capaian dari sasaran strategis dan masing-masing indikator target capaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strageis Pertama yaitu, “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdaagan”, memiliki satu indikator kinerja yaitu, Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal). Untuk realisasi kinerja tahun 2024 belum bisa disajikan berhubung karena nilai SAKIP tahun 2024 baru keluar nilai hasil reviuwnya dari inspektorat di perkirakan pada bulan April 2024, akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan optimis bahwa nilai atau target yang telah di tetapkan yaitu Nilai “B” pasti akan tercapai dengan berpedoman pada nilai akhir Lakip tahun 2023 dengan nilai A.



2. Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, memiliki satu indikator kinerja yaitu, Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB). Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 0,18%. Capaian Kinerja indikator Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) pada tahun tahun 2024 yaitu 95%.

Berdasarkan capaian tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah berupaya dalam mencapai dan melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan, memiliki satu indikator kinerja yaitu, Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB). Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 9,10%. Capaian kinerja dari indikator Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dari target yang telah di tentukan yaitu sebesar 99%.

Berdasarkan capaian tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah berupaya dalam mencapai dan melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

3.2 Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan Tahun 2024

Untuk perbandingan data capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	Predikat	B	A	Baik Sekali	B		
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	0.18%	0.17%	94%	0.19%	0.18%	95%
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	9.10%	9.07%	99.67%	9.20%	9.10%	99%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mempertahankan capaian kerjanya.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Untuk perbandingan data capaian kinerja Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan selama 5 (lima) tahun sesuai Renstra 2021-2026 dapat di lihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Jangka Menengah 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	A	B	
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	0.18%	0.21%	86%
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	9.10%	9.40%	97%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

1. Target Jangka Menengah pada akhir Periode RPJMD pada Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal) yaitu dengan nilai B. perbandingan realisasi dengan teraget belum dapat lakukan dikarenakan nilai SAKIP baru akan keluar sekitar bulan April 2024. Namun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat optimis dengan hasil yang dicapai akan memenuhi bahkan melebihi target dengan mengacu pada hasil tahun sebelumnya.
2. Target Jangka Menengah pada akhir Periode RPJMD pada Indikator Kinerja Utama Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) yaitu sebesar 0,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 0,18% maka tingkat realisasi kerjanya yaitu sebesar 86%.

3. Target Jangka Menengah pada akhir Periode RPJMD pada Indikator Kinerja Utama Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) yaitu sebesar 9,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 09,10% maka tingkat realisasi kinerjanya yaitu sebesar 97%.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	Predikat	B			adanya kerja sama dan dukungan yang baik dari setiap bidang dan pimpinan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan	menyelesaikan dokumen perencanaan dan loran kinerja dan lapran keuangan dengan tepat waktu
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	0.19%	0.18%	95%	Adanya dukungan dari pimpinan kepada ASN untuk melaksanakan kegiatan dan kerjasama yang baik dari setiap bidang	menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	9.20%	9.10%	99%	Adanya dukungan dari pimpinan kepada ASN untuk melaksanakan kegiatan dan kerjasama yang baik dari setiap bidang	menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kabupaten Nias Selatan yang juga menjadi Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang berbunyi: “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan

sebagai berikut:

- ❖ **Misi Pertama** : “Menciptkan Kultur Serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan”

Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pada Sasaran Strategis Pertama terdapat 1 indikator kinerja, yaitu :

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	B			

Sasaran Strategeis pertama pada indikator Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal) pada tahun 2024 di targetkan dengan nilai B . Realisasi kerja dari indikator ini belum dapat ditampilkan dikarenakan nilai SAKIP baru akan keluar pada bulan April 2024. Namun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat optimis dengan hasil yang dicapai akan memenuhi bahkan melebihi target dengan mengacu pada hasil tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran stragis ini yaitu, adanya kerja sama dan dukungan yang baik dari setiap bidang dan pimpinan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja pada indikator sasaran strategis pertama. Pada indikator sasaran strategis pertama ini hampir tidak ditemukan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



Gambar 3.1: Dokumentasi Perencanaa dan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024





- ❖ **Misi ke-Empat** : “Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif”

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan Pada Sasaran Strategis kedua terdapat 1 indikator kinerja, yaitu :

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	0.19%	0.18%	95%	Sangat berhasil

Sasaran Strageis kedua pada indikator Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) pada tahun 2024 di targetkan sebesar 0.19% dengan realisasi mencapai 0.18%. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran stragis ini yaitu, adanya kerja sama dan dukungan yang baik dari setiap bidang dan pimpinan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua. Pada indikator sasaran strategis kedua ini hampir tidak ditemukan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan Pada Sasaran Strategis kedua terdapat 1 indikator kinerja, yaitu :

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	9,20%	9,10%	99%	Sangat berhasil

Sasaran Strageis kedua pada indikator Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) pada tahun 2024 di targetkan sebesar 9,20% dengan realisasi mencapai 9,10%. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran stragis ini yaitu, adanya kerja sama dan dukungan yang baik dari setiap bidang dan pimpinan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja pada indikator sasaran strategis. Pada indikator sasaran strategis ini hampir tidak ditemukan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



Gambar 3.2.: Dokumentasi Monitoring dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya Berdasarkan pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran 2024				
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (AA)	Realisasi (RA)	AA X COP	AA X COP)-RA	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=6/5	(8)	(9)	(10)=(8)X(7)	(11)=(10)-(9)	(12)=(9)/(8)
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	Predikat	B		100%	417,426,345	412,599,824	417,426,345	4,826,521	98.84%
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	0.19%	0.18%	95%	535,117,155	503,140,620	506,953,094	3,812,474	94.02%
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	9.20%	9.10%	99%	30,056,500	29,917,094	29,729,799	187,295	99.54%
Jumlah							982,600,000	945,657,538	924,379,439	8,638,995	
$\frac{\sum((AA \times COP)-RA)}{\sum(AA)}$										1%	

Sumber rumus efisiensi : PMK Nomor 22/PMK.02/2021



1. Penggunaan sumber daya anggaran pada Sasaran Pertama telah mencapai 98,84%. Hal dikarenakan penggunaan anggaran diperuntukkan dalam mendukung seluruh program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama.
2. Penggunaan sumber daya anggaran pada Sasaran kedua telah mencapai 94,02%. Hal dikarenakan penggunaan anggaran diperuntukkan dalam mendukung seluruh program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja kedua.
3. Penggunaan sumber daya anggaran pada Sasaran Pertama telah mencapai 99,54%. Hal dikarenakan penggunaan anggaran diperuntukkan dalam mendukung seluruh program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja ketiga.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan program/kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Pertama : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Capaian kinerja program pada Sasaran Strategis Pertama :

NO	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel Dan Transparan	100%	100%

Dari 1 (satu) Program tersebut terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub kegiatan. Pada sasaran pertama dengan realisasi indikator kinerja sebesar 100%. Dari. Berikut Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran Pertama :



Tabel 3.8
Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Pertama

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	100 %	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</i>	8 Dok	8	Dok
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1	Dok
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3	Dok
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</i>	19 Dok	19	Dok
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14	Bln
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 Dok	18	Dok



	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12	Laporan
<i>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	6 Unit	6	Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4	Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2	Unit
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan yang Tersedia</i>	100 %	100 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Lembar	1500	Lembar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara</i>	1 Unit	7	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7	Unit

Sasaran Kedua : Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan

Capaian kinerja program pada Sasaran Strategis Kedua :



NO	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang Terselesaikan	100%	100%

Dari 1 (satu) Program tersebut terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan. Keberhasilan program dari sasaran kedua ini dikarenakan kerjasama dan kontribusi dari bidang masing-masing dalam melaksanakan kegiatannya. Berikut Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran kedua :

Tabel 3.9
Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Kedua

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang Terselesaikan	100	%	25	%
<i>Penyusunan dan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota</i>	<i>Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota</i>	1	Dok	1	Dok
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	1	Dok	1	dok
koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dok	1	dok
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dok	1	Dok

Sasaran Ketiga : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan

Capaian kinerja program pada Sasaran Strategis Ketiga :

NO	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	80%	65%



Dari 1 (satu) Program tersebut terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub kegiatan. Keberhasilan program dari sasaran kedua ini dikarenakan kerjasama dan kontribusi dari bidang masing-masing dalam melaksanakan kegiatannya. Berikut Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran kedua :

Tabel 3.10
Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Ketiga

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk	75 %	75 %
<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota</i>	30 Laporan	30 Laporan
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30 Laporan	30 Laporan
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	10 Laporan	10 Laporan
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10 Laporan	10 Laporan

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp982.600.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp968.314.150,- dan Belanja Modal sebesar Rp14.285.850,-. Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp945.657.538,- (96,24%), yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp931.371.688,- (96,18%), dan Belanja Modal sebesar Rp14.285.850 (100%)



Berikut Tabel Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	Rp968.314.150	Rp931.371.688	96,18%
2	Belanja Modal	Rp14.285.850	Rp14.285.850	100%
3	Total Anggaran	Rp982.600.000	Rp945.657.538	96,24%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Realisasi belanja daerah pada tahun 2024 adalah 81,23% bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74,35% Berikut perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Target		Realisasi		%	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Belanja Operasi	1.214.088.610	968.314.150	819.418.880	931.371.688	67,49%	96,18%
2	Belanja Modal	477.361.390	14.285.850	438.287.456	14.285.850	91,81%	100%
3	Total Anggaran	1.691.450.000	982.600.000	1.257.706.336	945.657.538	74,35%	96,24%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	B			417.426.040	412.599.824	99,25 %
2	Meningkatkan kontribusi sektor industry pengolahan	Persentase kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	0.19%	0.18%	95%	30.056.500	29.917.094	61,42 %
3	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	9.20%	9.10%	99%	535.117.155	503.140.620	
Jumlah realisasi Anggaran 2022						982.600.000	945.657.538	96,24 %

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024



BAB IV PENUTUP

1.7 KESIMPULAN

Laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2024. Dalam rencana kinerja tahun 2024 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis pertama : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal) belum dapat di tampilkan karna masih dalam tahap penyusunan. Nilai SAKIP akan keluar pada bulan April dan akan dilaporkan setelahnya.
- b. Sasaran strategis kedua : Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan dengan capaian kinerja 95% menggambarkan pencapaian kinerja yang sangat baik
- c. Sasaran strategis ketiga : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dengan capaian kinerja 99% menggambarkan kinerja yang sangat baik

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan diharapkan dengan sangat untuk berperan dalam mengkondisikan sistem perdagangan yang sehat atau terwujudnya stabilitas harga pasar, juga disarankan perlu adanya menambah sarana / prasarana dan penambahan anggaran pengawasan pasar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 ini disampaikan, dan guna kesempurnaan laporan ini saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi terwujudnya Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan



Edy Martin Ley, SE., MM
Pembina Tk.I

NIP. 19750316 199803 1 007



L A M P I R A N